

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun ekonomi desa adalah memandirikan ekonomi desa, masyarakat desa bisa sejahtera dan pemerintahan desa bisa menjadi pelayanan dan penggerak ekonomi desa. Apabila pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu proses dimana pemerintah desa dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (*pertumbuhan ekonomi*) di wilayah tersebut. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa yakni untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi (Lincoln Arsyad, 1988).

Konsep pembangunan ekonomi desa harus benar-benar bertumpu pada kekuatan masyarakat desa. Potensi yang dimiliki oleh desa harus benar-benar menjadi akar dalam pembangunan ekonomi Desa. Potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun ekonomi desa. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa, Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok

dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah BUMDes. Lembaga perekonomian pedesaan sampai sekarang menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa (Jimmi Sofyan).

BUMDes merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di pedesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini membuat banyak desa yang membangun dan mengembangkan BUMDes dengan program yang beragam. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes), namun pada pelaksanaannya masih banyak BUMDes yang belum berkembang dengan baik, penyebab utamanya adalah belum dikelolanya BUMDes secara profesional (Alfika, Muh Asra dan Rina Nurafifah, 2020).

Pembentukan Bumdes menurut Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes (2017,1) dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat seperti kelompok arisan, lembaga ekonomi adat, serta kegiatan perekonomian yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk program dan proyek dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM); Badan Kredit Desa (BKD), program P2KP, program UP KPKK, dan

lainnya yang berada dan berkedudukan di desa. Pendirian BUMDes merupakan inisiatif desa, bukan perintah dari pemerintah desa, sehingga pengelolaannya harus berdasarkan prinsip kemandirian desa dan semangat kekeluargaan serta gotong royongan. BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa hendaknya diselenggarakan dan dikelola secara profesional, kreatif dan mandiri.

Dalam pengelolaan BUMDes peneliti melihat pentingnya strategi, dalam hal ini strategi BUMDes memerlukan adanya inovasi dan penerapan strategi yang tepat dengan melihat peluang dari dalam usaha. Serta identifikasi dari kekuatan dan kelemahan potensi yang akan dikembangkan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan, strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan (George Steiner, *Strategic Planning*, 1979). Strategi pengembangan ekonomi pedesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pentingnya arah strategi kebijakan pengembangan ekonomi pedesaan tetap berbasis kepada kegiatan yang potensial dan pengelolaan sumber daya alam, namun dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja pedesaan, perlu dikembangkan pula berbagai kegiatan, sehingga strategi pengembangan ekonomi pedesaan harus meliputi produktivitas nelayan melalui penerapan teknologi tepat guna dan pengelolaan hasil tangkapan. Dan dalam mengembangkan kewirausahaan dan penguatan BUMDes harus menyediakan akses pasar dan sistem informasi pasar bagi nelayan dan unit

usaha seperti pariwisata serta terjadinya pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain, unit usaha yang akan dijalankan badan usaha milik desa hendaknya bertumpu pada potensi dan kebutuhan desa. Pendirian BUMDes merupakan inisiatif desa, bukan perintah dari pemerintah desa, sehingga pengelolaannya harus berdasarkan prinsip kemandirian desa dan semangat kekeluargaan serta gotong royongan. BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa hendaknya diselenggarakan dan dikelola secara profesional, kreatif dan mandiri

Desa Hadakewa merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini berdiri dan beroperasi sejak tahun 2018 yang diberi nama BUMDes 7 Maret. BUMDes ini memiliki 2 (dua) unit usaha diantaranya, unit usaha ikan teri dan wisata pantai Hadakewa. Tidak bisa dipungkiri sumbangan terbesar untuk pendapatan asli desa Hadakewa yang dari hasil pengelolaan ikan teri sebesar 300 juta rupiah per tahun dan unit usaha pariwisata menyumbang 40 juta rupiah pada tahun 2022, dan dari pendapatan tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan membayar para pekerja dan sebagiannya masuk ke kas desa.

Maka dapat digambarkan proses pembentukan BUMDes dan modal awal usahanya sebagai berikut :

1. Tahapan awal pendukung sumber daya finansial, pemerintah desa dan masyarakat desa sepakat untuk mengalokasikan Dana Desa sebesar 85 juta rupiah kepada BUMDes 7 Maret untuk memulai usaha ikan teri. Usaha ini mampu memberdayakan sekitar 30 orang warga desa yang terdiri dari para nelayan dan mama yang mengeloah hasil tangkapan tersebut. Dan pada tahun 2021 tepatnya di tanggal 14 februari Dana Desa dikucurkan lagi sebesar 830 juta rupiah untuk kembali membuka unit usaha pariwisata yang diluncurkan di Hadakewa, kehadiran unit usaha ini tentunya berdampak baik untuk masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat kurang lebih 25 orang.

Tabel 1.1

Data Modal Awal Unit Usaha

No	Jenis Usaha	Tahun	Modal
1	Unit Usaha Ikan Teri	2018	Rp 85.934.000,00,-
2	Unit Usaha Pariwisata	2021	Rp 830.000.000,-

Sumber BUMDes 7 Maret

Pada tabel diatas dapat dilihat modal awal tahun pertama pembentukan unit usaha yang ada di BUMDes yang dimaksud untuk mengelola sarana prasarana pada tahap awal untuk mendukung jalannya suatu usaha pada tahap perencanaan. Dari modal tersebut BUMDes dapat mengelola sarana prasarana yang di butuhkan oleh para pekerja sehingga suatu usaha dapat berjalan dengan sendirinya dan terorganisir dengan baik.

2. Sedangkan untuk Strategi Perndukung Sumber Daya manusia dan kepemilikan BUMDes 7 Maret, Bapak Klemens Kwaman senditi selaku Kepala Desa Hadakewa menyatakan,

“Kantor BUMDes adalah Barang Milik Daerah atau sewa bangunan pemda, BUMDes sendiri memiliki badan hukum yang telah diterbitkan oleh kemenkumham”(2023).

Maka dari itu guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi sumber daya yang dikelola berupa tenaga, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Data Tingkat Pendidikan

NO	pegawai	Pendidikan	Jumlah
1	Ketua	S1	1
2	Direktur Unit Usaha Ikan Teri dan Pariwisata	S1	1
3	Sekretaris	S1	1
4	Bendahara	S1	1
5	Manajer Unit Usaha Ikan Teri dan Pariwisata	S1	2
6	Kepala Unit Usaha Ikan Teri	S1	1
7	Kepala Unit Usaha Pariwisata	S1	1
8	Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ikan Teri	-	30
9	Pemberdayaan Masyarakat Usaha Pariwisata	-	25
Jumlah			63

Sumber : BUMDes 7 Maret (2023)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa para karyawan BUMDes dirasa baik untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa, walaupun demikian masih banyak masyarakat desa yang berpendidikan terbatas yang belum mengetahui potensi BUMDes yang hadir di tengah masyarakat desa Hadakewa.

Maka dari itu dalam pengembangan BUMDes 7 Maret juga terdapat permasalahan yang dihadapi sekarang adalah, membenahi SDM (Sumber Daya Manusia) dan rendahnya pemahaman masyarakat adalah tantangan yang dihadapi BUMDes 7 Maret sekarang ini. Dikarenakan selama ini masyarakat merasa nyaman dengan pola yang dikembangkan, banyak masyarakat yang beranggapan mereka bisa menjual hasil tangkapan ikan tanpa BUMDes. Tetapi hal ini yang berbeda dulu bukan nelayan yang menentukan harga tetapi pembeli, untung atau tidaknya yang penting bisa terjual habis. Maka masih banyak masyarakat desa Hadakewa yang belum memahami fungsi dan peran BUMDes karena masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah yang belum terlalu paham akan hadirnya BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa.

Berdasarkan pengambilan data awal penulis melakukan wawancara melalui media perantara telepon seluler seperti whatsapp. Peneliti Bersama Bapak Klemens Kwaman selaku Kepala Desa Hadakewa sekaligus pendiri BUMDes, beliau juga menyatakan,

“Sebagian dari masyarakat desa masih kurang dalam hal pemahaman tentang potensi yang dikembangkan BUMDes, jadi dari pihak kami pemerintah desa sendiri harus lebih banyak memberikan pemahaman yang terperinci kepada masyarakat yang SDM nya masih rendah” (2023).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan memilih judul, **“Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 7 Maret Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini adalah hal yang paling terpenting karena dilakukan terlebih dahulu untuk sampai pada tahap pembahasan yang lebih lanjut. Adapun masalah-masalah yang dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengembangan ekonomi BUMDes 7 Maret untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis strategi yang digunakan dalam pengembangan BUMDes di desa Hadakewa sehingga memberikan peluang kepada masyarakat kecil untuk dapat mengembangkan usaha-usaha yang mereka tekuni. Dan mengetahui strategi pengelolaan BUMDes sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi semakin lebih baik dan terus maju untuk kedepannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan penulis ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan terkhususnya tentang strategi pengelolaan BUMDes 7 Maret untuk memajukan kesejahteraan masyarakat kecil. Dan bagi desa Hadakewa, hasil penelitian ini sekiranya bisa menjadi bahan masukan untuk pengelolaan desa dan juga dapat menjadi referensi bagi desa-desa yang sekitar pesisir pantai untuk dapat mencontoh apa yang sudah diterapkan oleh desa Hadakewa.